

KALEIDOSKOP

# PENEGAKAN HUKUM 2016



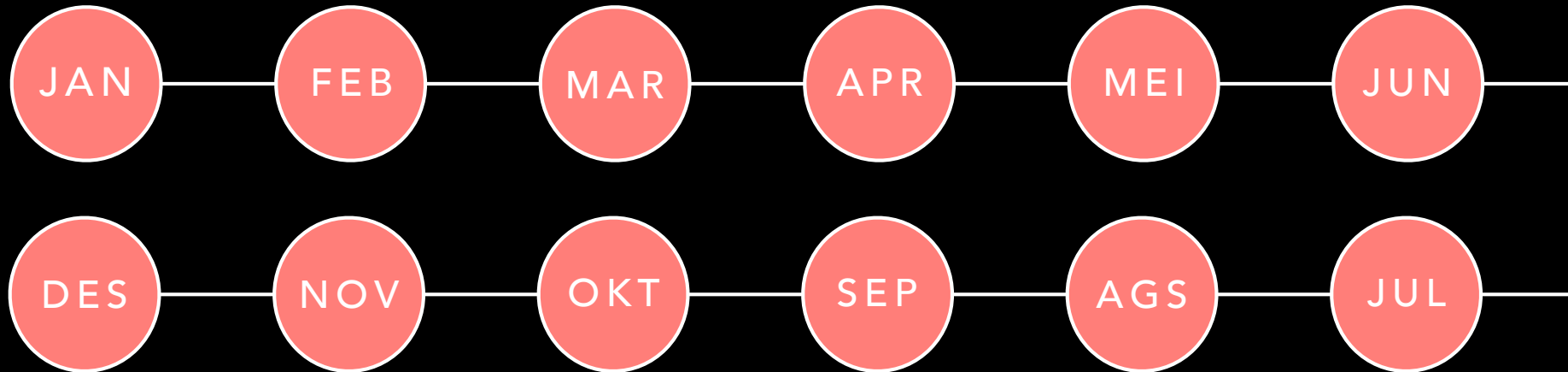
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

RABU, 21 DESEMBER 2016  
BAKOEL KOFFIE, CIKINI, JAKARTA

# PENEGAKAN HUKUM DI 2016

PEMBAHASAN BUKU I RCUHP

			KERUSUHAN LAPAS BANCEUY	ANGGARAN KEJAKSAAN	
KASUS ERWIN NATOSMAL OEMAR	KORUPSI KASUBDIT PERDATA MAHKAMAH AGUNG	DEPONEERING BW & AS	KASUS PERKOSAAN YY		NARKOTIKA
USULAN PERPPU KEBIRI		KERUSUHAN RUTAN MALABERO	KORUPSI NURHADI	PENERBITAN PERPPU KEBIRI	RUU PKS DI PROLEGNAS 2017



KASUS AHOK	SATGAS SABER PUNGLI	PAKET KEBIJAKAN HUKUM	KORUPSI IRMAN GUSMAN	PP REMISI KORUPTOR	KERUSUHAN LAPAS TJ. GUSTA
	RUU JABATAN HAKIM	PENGESAHAN PERPPU KEBIRI	SELEKSI HAKIM AD HOC TIPIKOR	KASUS HARIS AZHAR	EKSEKUSI MATI GELOMBANG III
	SELEKSI SEKRETARIS MA	KASUS JESSICA			

PEMBAHASAN BUKU II RCUHP

PEMBAHASAN BUKU I RCUHP

# PROFESIONALITAS PENEGAK HUKUM

# KORUPSI PERADILAN & FAIR TRIAL

## INTEGRITAS INSTITUSI PERADILAN

- Mafia hukum
- Pengawasan internal & eksternal yang tidak sinkron
- Sistem seleksi hakim yang tidak efektif
- Fasilitas, integritas pejabat pengadilan & komitmen pimpinan MA tidak mendukung pelayanan publik yang optimal

## FAIR TRIAL

- Minim pengaturan rinci tentang praduga tak bersalah
- Proses pemberitaan persidangan secara langsung dan terus-menerus
- Proses hukum yang independen dari tekanan publik

# DATA KRIMINALITAS

# CARUT-MARUTNYA DATA KRIMINALITAS

## DATA KRIMINALITAS

- Minim tersedia
  - Kepolisian, Kejaksaan, RUTAN & LAPAS
- Berbeda pencatatan dan tidak valid
- Narkotika di Laporan POLRI 2015 dan Statistik Kriminalitas BPS 2015

## KEBIJAKAN TANPA BUKTI

- Anggaran Kejaksaan
  - Tidak bisa menghitung kebutuhan penanganan kasus
- Penanganan kasus narkotika
  - Penyalahguna vs Pemilik dan Pembeli
- Overcrowding di LAPAS

# LEGISLASI & KEBIJAKAN PIDANA

## KEKERASAN SEKSUAL

- PERPPU Kebiri
- Menaikkan ancaman hukuman sebagai solusi
- Perlindungan dan rehabilitasi korban minim
- RUU PKS & RKUHP

## HUKUMAN MATI

- Eksekusi terhadap 4 orang terpidana mati
- Keppres Grasi
- Unfair trial
  - Zulfiqar Ali
  - Humphrey

## RKUHP

- Memunculkan tindak pidana yang sudah dihapus oleh MK
- Proteksi negara berlebihan
- Masuk ke ruang privat
- Gradasi pembedaan



# MINIMNYA KONTROL KEWENANGAN PENEGAK HUKUM

## PENETAPAN TERSANGKA

- Erwin Natosmal Oemar
- Haris Azhar
- BW & AS
- Praperadilan
  - Post factum

## ABSENNYA DOMINUS LITIS

- Check and balances
- 2012-2014
  - 44.273 menggantung di prapenuntutan
  - 256.270 perkara tidak dilaporkan ke Penuntut Umum

# REKOMENDASI

## PERBAIKAN UNTUK 2017

### INTEGRITAS INSTITUSI PERADILAN

- Koordinasi dan sinergi dari Bawas MA, KY, KPK, POLRI, Kejaksaan, Ombudsman untuk memangkas habis praktik mafia hukum
- Penerapan *best practices* dari MA & seleksi hakim yang ketat dan tidak berkompromi
- Pemilihan Sekretaris MA oleh Presiden

### FAIR TRIAL

- Pengaturan lebih rinci tentang *presumption of innocence*
- Reformasi hukum acara pidana dan hukum acara perdata untuk memperbaiki celah *miscarriage of justice*

### DATA KRIMINALITAS

- Pembangunan sistem pencatatan data kriminalitas terpadu, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan
- Pengembangan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*)

### LEGISLASI & KEBIJAKAN REPRESIF

- Ultimum remedium
- Reklasifikasi tindak pidana dan gradasi ppidanaan dalam RKUHP

### KONTROL KEWENANGAN PENEGAK HUKUM

- Pre-factum oversight dalam RKUHAP
- Dominus litis dalam penyidikan

KALEIDOSKOP PENEGAKAN HUKUM 2016

# TERIMA KASIH



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

RABU, 21 DESEMBER 2016  
BAKOEL KOFFIE, CIKINI, JAKARTA